

*Rumpun Ilmu : Ilmu Sosial Humaniora*

**LAPORAN PENELITIAN  
DIPA FISIP TAHUN ANGGARAN 2021**



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN  
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA  
(MUSREMBANGDES) DI DESA WAIHERU  
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA KOTA AMBON**

**PENELITI :**

1. **Nurainy Latuconsina, S.IP, M.Si.**  
NIDN : 0008078008
2. **Atikah Khairunnisa, MA**  
NIDN : 0011127503
3. **Johan Tehuayo, S.Sos, MA.**  
NIDN : 00290575401

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
2021**

## II.

### RINGKASAN PENELITIAN

Proses peletakan landasan pemikiran pengaturan tentang suatu pemerintahan desa berupa partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat memiliki suatu pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan suatu peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama dan harus mampu mengakomodir aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui perangkat dari lembaga kemasyarakatan.

Fenomena yang terjadi menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan terkadang tidak melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perumusan kebijakan pembangunan. Kesalahan perencanaan yang diimplementasikan di lapangan sering tidak dapat dijalankan, hal ini terjadi karena akibat paradigma berpikir aparatur birokrasi yang melekat dengan berbagai bentuk kepentingan yang tidak bisa dilepaskan.

Salah satu bentuk acuan yang dapat dikemukakan disini adalah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANGDES). Musrenbangdes yang merupakan suatu mekanisme dalam penentuan perumusan kebijakan dan program pembangunan yang seharusnya melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai salah satu pengambilan keputusan. Terkadang tidak menggambarkan suatu bentuk forum yang dapat semua aspirasi masyarakat. Masyarakat yang ada sebagai pemangku kepentingan sering diabaikan, sehingga penjangkauan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh: organisasi-organisasi lokal yang ada dalam masyarakat seperti kelompok adat, dusun, rukun tetangga, maupun rukun warga jarang dilibatkan dalam suatu bentuk mekanisme Musrenbang pada tingkatan desa/kelurahan. Persoalan yang muncul adalah bahwa masyarakat yang membentuk dinamika kepentingan ini merupakan suatu kumpulan individu yang cenderung adaptif dengan kemampuan lokal, yang mempertahankan suatu ciri khas nilai-nilai social budaya.

**Kata Kunci :** *partisipasi, musyawarah, perencanaan dan pembangunan*